

**STATISTIK  
KEWANGAN  
DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
2013**



**STATISTIK  
KEUANGAN  
DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
2013**

[www.kalimantan.bps.go.id](http://www.kalimantan.bps.go.id)

# **STATISTIK KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 2013**

ISBN : 978-602-6774-06-4  
Nomor Publikasi : 62540.1511  
Katalog BPS : 7203007.62  
Ukuran Buku : 15 x 21 cm  
Jumlah Halaman : xii + 63 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tim Penyusunan Naskah:

Penanggung Jawab Umum : Sukardi  
Editor Penanggung Jawab Teknis : Moh. Wahyu Yulianto  
Koordinator Penyusun : Eka Restuti Fajarina  
Titah Maulidyah

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Koordinator : Bob Setiabudi  
Tata Letak : Yoga Sasmita  
Vina Natalia  
Gambar Kulit : Eddy Surahman

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

## KATA PENGANTAR

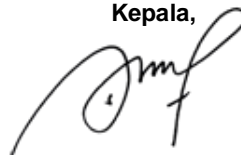
Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kalimantan Tengah 2013 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap data statistik keuangan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Data yang disajikan pada publikasi ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013. Data tersebut merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi yang selanjutnya diolah di BPS RI.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

**Palangka Raya, November 2015**  
**BPS Provinsi Kalimantan Tengah**

**Kepala,**



**Dr. Ir. Sukardi, M.Si**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik .....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	3
1.4 Konsep dan Definisi .....	3
BAB II Ulasan Ringkas .....	15
2.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah .....	15
2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	15
2.1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	18
2.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah. ....	21
2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah .....	21
2.2.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah .....	27
Lampiran .....	31
Daftar Pustaka.....	65



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2012-2013.....	16
Tabel 2.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2012-2013.....	19
Tabel 2.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2012-2013 .....	22
Tabel 2.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2012-2013.....	27





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.....	17
Gambar 2.2	Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.....	20
Gambar 2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.....	23
Gambar 2.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2013 .....	24
Gambar 2.5	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.....	25
Gambar 2.6	Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Pembentukan PDRB Kalimantan Tengah, 2013.....	26
Gambar 2.6	Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2013 .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013.....	33
Lampiran 2.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013.....	34
Lampiran 3.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	35
Lampiran 4.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	36
Lampiran 5.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	37
Lampiran 6.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	38
Lampiran 7.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Juta Rupiah), 2011-2013.....	39
Lampiran 8.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Juta Rupiah), 2011-2013.....	40
Lampiran 9.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	41
Lampiran 10.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kapuas (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	42
Lampiran 11.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	43
Lampiran 12.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	44
Lampiran 13.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	45
Lampiran 14.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	46
Lampiran 15.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	47

Lampiran 16.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	48
Lampiran 17.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah), 2011-2013.....	49
Lampiran 18.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah), 2011-2013.....	50
Lampiran 19.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	51
Lampiran 20.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Seruyan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	52
Lampiran 21.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Katingan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	53
Lampiran 22.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Katingan (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	54
Lampiran 23.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	55
Lampiran 24.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	56
Lampiran 25.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	57
Lampiran 26.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Juta Rupiah), 2011-2013.....	58
Lampiran 27.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur(Juta Rupiah), 2011-2013 .....	59
Lampiran 28.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	60
Lampiran 29.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah), 2011-2013.....	61
Lampiran 30.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	62
Lampiran 31.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Palangka Raya (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	63
Lampiran 32.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Palangka Raya (Juta Rupiah), 2011-2013 .....	64

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik.

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan pembangunan nasional, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan

untuk lebih meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kewajibannya pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu (1) pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara efisien yang terkumpul dalam komponen Pendapatan, (2) pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara responsif, efektif, dan efisien ke dalam anggaran yang direfleksikan dalam komponen Belanja.

## **1.2 Tujuan**

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kalimantan Tengah 2014 secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Publikasi ini memberikan informasi antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan di masing-masing daerah.

### **1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data**

Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Daftar APBD-1 dan Daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pencacahannya dicatat dengan menggunakan Daftar APBD-2 dan Daftar K-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

### **1.4 Konsep dan Definisi**

Bagian ini berisi beberapa konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kalimantan Tengah 2014. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah realisasi/perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap tahun anggaran.



## **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

**A.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**A.1.1. Pajak Daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, dan lain-lain.

**A.1.2. Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada

pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaran bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

**A.1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

**A.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** adalah pendapatan daerah yang **meliputi** hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**A.2. Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil

pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **A.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

**A.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

**A.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)** adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional

3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

**A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan yang sah lainnya.

## **B. Belanja Daerah**

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

**B.1. Belanja Tidak Langsung** adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

**B.1.1. Belanja Pegawai Tidak Langsung** adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

**B.1.2. Belanja Bunga** adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**B.1.3. Belanja Subsidi** adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk **bantuan** biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

**B.1.4. Belanja Hibah** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah

desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

**B.1.5. Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**B.1.5.1. Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan** adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

**B.1.5.2. Belanja Partai Politik** adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

**B.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa** adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepala desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi

2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

**B.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa** *adalah*

permainan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

**B.1.8. Belanja Tidak Terduga** adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya **tidak** biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**B.2. Belanja Langsung** adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan **dapat** diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

**B.2.1. Belanja Pegawai Langsung** adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

**B.2.2. Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk **pembelian**/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lainnya.

**B.2.3. Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap



berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepastakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

**C. Pembiayaan Daerah** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaiknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

**C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah** adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

**C.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu** adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

**C.1.2. Pencairan Dana Cadangan** adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

**C.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

**C.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah** adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

**C.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman** adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

**C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah** adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

**C.2.1. Pembentukan Dana Cadangan** adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diberikan dalam satu tahun anggaran.

**C.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah** adalah **pengeluaran** daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

**C.2.3. Pembayaran Pokok Utang** adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**C.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah** adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

**C.3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan** adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

## **BAB II**

# **ULASAN RINGKAS**

### **2.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD tahun 2013 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya dalam menentukan target penerimaan daerah untuk menaikkan belanja daerah.

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.

#### **2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pada tahun 2013, pendapatan daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 2,81 triliun rupiah atau naik 11,74 persen dari tahun sebelumnya. Dana tersebut sebesar 1,44 triliun rupiah berasal dari dana perimbangan, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,09 triliun rupiah, dan sebesar 0,27 triliun rupiah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2013 karena adanya kenaikan yang cukup tinggi pada PAD dan dana perimbangan yang meningkat masing-masing 15,70 persen dan 11,30 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mendukung pendapatan daerah yang

bersumber dari pendapatan asli daerah pada tahun 2014 untuk lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2012-2013**

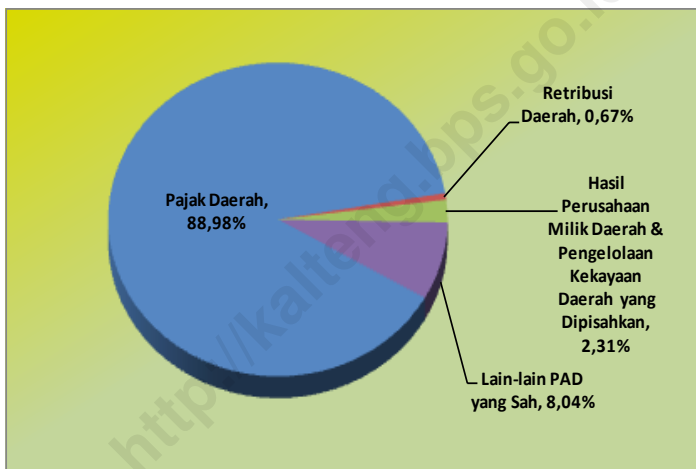
Jenis Penerimaan	2012	2013	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 514 031</b>	<b>2 809 096</b>	<b>11.74</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	945 363	1 093 821	15.70
1.1. Pajak Daerah	836 504	973 245	16.35
1.2. Retribusi Daerah	6 963	7 372	5.87
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22 159	25 299	14.17
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	79 736	87 906	10.25
2. Dana Perimbangan	1 296 011	1 442 478	11.30
2.1. Bagi Hasil Pajak	163 502	169 675	3.78
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	131 069	146 987	12.14
2.3. Dana Alokasi Umum	951 256	1 062 517	11.70
2.4. Dana Alokasi Khusus	50 184	63 299	26.13
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	272 657	272 797	0.05
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>451 606</b>	<b>559 334</b>	<b>23.85</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2 965 637</b>	<b>3 368 430</b>	<b>13.58</b>

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2013 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan yaitu 51,35 persen. Adapun pendapatan asli daerah hanya menyumbang sebesar 38,94 persen.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan

berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 945,36 milyar rupiah menjadi 1,09 trilyun rupiah atau naik 15,70 persen.

**Gambar 2.1 Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah, 2013**



Dari gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2013, sumber pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 973,24 milyar rupiah (88,98 persen). Dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 87,91 milyar rupiah (8,04 persen), sementara sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 25,29 milyar rupiah (2,31 persen). Retribusi Daerah yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan

pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,67 persen.

Kontribusi terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,06 triliun rupiah atau sekitar 73,66 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sebesar 63,29 milyar rupiah dan memberikan kontribusi sebesar 4,39 persen.

### **2.1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

**Tabel 2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2012-2013**

Jenis Pengeluaran	2012	2013	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1 229 066</b>	<b>1 361 951</b>	<b>10,81</b>
1. Belanja Pegawai	321 003	346 955	8,08
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	18 439	13 580	-26,35
4. Belanja Hibah	357 148	289 035	-19,07
5. Belanja Bantuan Sosial	116 715	59 367	-49,14
6. Belanja Bagi Hasil	372 548	485 973	30,45
7. Belanja Bantuan Keuangan	43 084	165 888	285,03
8. Belanja Tidak Terduga	129	1 153	791,50
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1 122 281</b>	<b>1 566 775</b>	<b>39,61</b>
1. Belanja Pegawai	65 931	67 961	3,08
2. Belanja Barang dan Jasa	420 536	558 211	32,74
3. Belanja Modal	635 814	940 603	47,94
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2 351 347</b>	<b>2 928 726</b>	<b>24,56</b>
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>614 290</b>	<b>439 705</b>	<b>-28,42</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2 965 637</b>	<b>3 368 430</b>	<b>13,58</b>

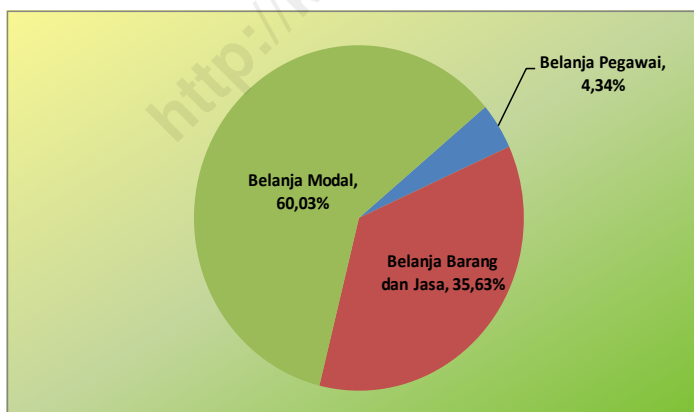
Sama halnya dengan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang naik 11,74 persen, belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 juga naik lebih tinggi hingga 24,56 persen dari 2,35 triliun rupiah tahun 2012 menjadi 2,93 triliun rupiah pada tahun 2013. Peningkatan terbesar adalah kenaikan pada Belanja Tidak Terduga dari 129 juta rupiah tahun 2012 naik menjadi 1,15 milyar rupiah tahun 2013. Terjadinya kenaikan ini dimungkinkan



karena membengkaknya biaya penanggulangan bencana asap di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013. Salah satu langkah bijak yang diambil pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam optimalisasi pendapatan adalah dengan mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dari 16,46 persen pada tahun 2012 menjadi 14,17 persen pada tahun 2013.

Sejak tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur tetapi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Berdasarkan struktur ini, pada tahun 2013 belanja langsung naik sebesar 39,61 persen dan belanja tidak langsung naik sebesar 10,81 persen.

**Gambar 2.2 Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2013**



Alokasi belanja langsung didominasi untuk kebutuhan belanja modal, yaitu sebesar 940,60 milyar rupiah atau sebesar 60,03 persen. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar 558,21 milyar rupiah atau sekitar 35,63 persen. Sedangkan untuk pengeluaran pegawai hanya 4,34 persen yaitu 67,96 milyar rupiah.

Dibandingkan dengan tahun 2012, belanja tidak langsung pada tahun 2013 naik dari 1,23 trilyun rupiah menjadi 1,36 trilyun rupiah. Kontribusi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2012 sebesar 52,27 persen, dan pada tahun 2013 kontribusinya menjadi 46,50 persen. Dengan turunnya *share* belanja tidak langsung pada tahun 2013, memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi.

## **2.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah**

### **2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Kalimantan Tengah**

Pada Tabel 2.3 dapat dilihat total realisasi pendapatan di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013 sebesar 11,03 trilyun rupiah. Sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan dari dana perimbangan merupakan penerimaan yang paling besar, yaitu sebesar 9,19 trilyun rupiah atau 83,32 persen.

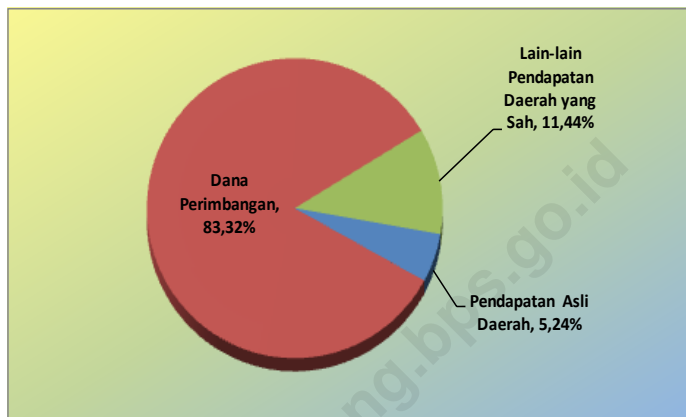
**Tabel 2.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2012-2013**

Jenis Penerimaan	2012	2013	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9 477 463</b>	<b>11 030 555</b>	<b>16,39</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	487 807	578 256	18,54
1.1. Pajak Daerah	107 145	137 426	28,26
1.2. Retribusi Daerah	123 555	116 097	-6,04
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39 523	44 844	13,46
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	217 584	279 888	28,63
2. Dana Perimbangan	8 128 887	9 190 336	13,06
2.1. Bagi Hasil Pajak	602 236	608 100	0,97
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	658 825	732 710	11,21
2.3. Dana Alokasi Umum	6 402 642	7 296 756	13,96
2.4. Dana Alokasi Khusus	465 184	552 770	18,83
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	860 769	1 261 964	46,61
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 520 925</b>	<b>1 603 374</b>	<b>5,42</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>10 998 387</b>	<b>12 633 929</b>	<b>14,87</b>

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan tersebut akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini

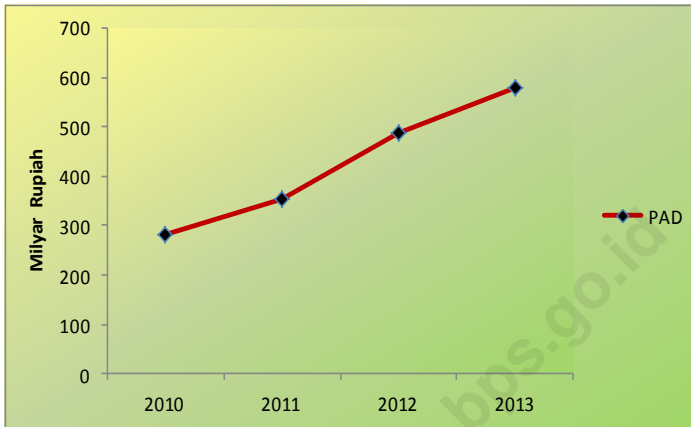
digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

**Gambar 2.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2013**



Namun penerimaan daerah dari PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Pada tahun 2013, PAD dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 578,25 milyar rupiah atau naik 18,54 persen dari tahun sebelumnya. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2013 hanya sebesar 5,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

**Gambar 2.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2013**

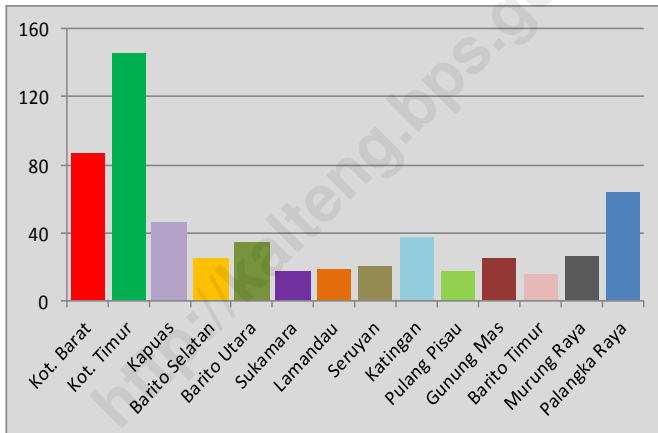


Dalam lima tahun terakhir, realisasi PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah cenderung terus meningkat. Walaupun persentase dari total pendapatan daerah masih rendah, namun peningkatan nilai PAD dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah.

Dari empat belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 2.5), pada tahun 2013 Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 25,23 persen sementara rasio PAD Kabupaten Barito Timur paling rendah yaitu sebesar 2,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kabupaten Kotawaringin Timur disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2013 yang awalnya ditargetkan Rp125,658 milyar, realisasinya justru mencapai 102,68 persen atau Rp129,031 milyar (Republika, 30 Desember 2013). Kesadaran masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membayar pajak dan retribusi makin meningkat mulai periode 2010 sampai 2014, sehingga berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. (Antara Kalteng, 4 Juni 2015)

**Gambar 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2013**

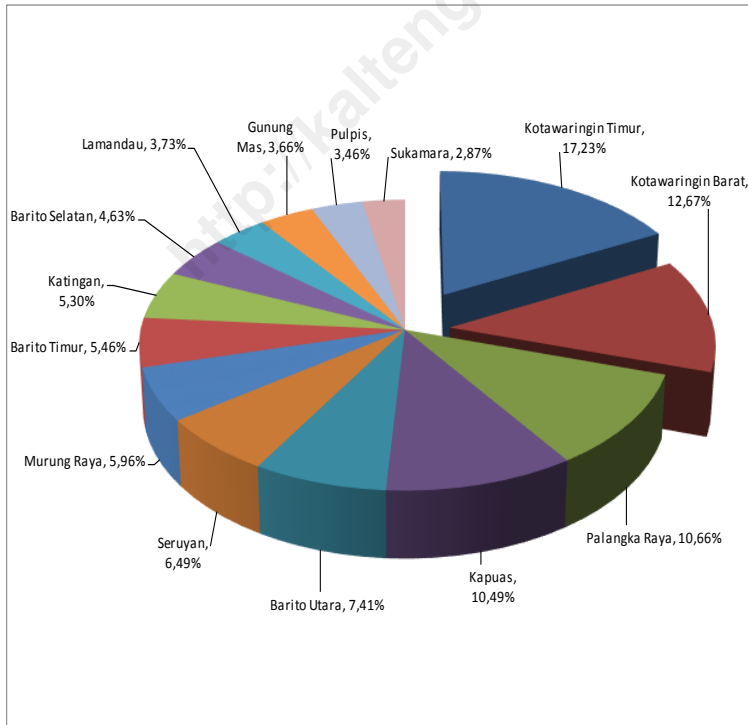


Apabila dilihat dari peranan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 (Gambar 2.6), PDRB tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 17,23 persen, diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nilai 12,67 persen, dan Kota Palangka Raya sebesar 10,66 persen. Adapun peranan PDRB terendah ada di Kabupaten Sukamara sebesar 2,87 persen. Peranan

PDRB tersebut dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHB atau kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan di Kalimantan Tengah merupakan total nilai tambah bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Kontribusi/peranan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2013 cukup besar yakni mencapai 29,89 persen, sedangkan sisanya berasal dari kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat masih menjadi andalan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Gambar 2.6 Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Pembentukan**



## 2.2.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2013 mengalami peningkatan 19,10 persen atau mencapai 10,68 trilyun rupiah dari sekitar 8,97 trilyun rupiah pada tahun 2012. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 12,99 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2013 naik 24,77 persen. Peningkatan belanja langsung dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup tinggi pada belanja modal dan belanja pegawai.

**Tabel 2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2012-2013**

Jenis Pengeluaran	2012	2013	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4 318 898</b>	<b>4 879 901</b>	<b>12.99</b>
1. Belanja Pegawai	3 695 366	4 108 257	11.17
2. Belanja Bunga	3 632	3 591	-1.13
3. Belanja Subsidi	4 703	4 135	-12.06
4. Belanja Hibah	231 848	374 626	61.58
5. Belanja Bantuan Sosial	64 998	52 535	-19.18
6. Belanja Bagi Hasil	9 908	10 493	5.90
7. Belanja Bantuan Keuangan	297 758	316 508	6.30
8. Belanja Tidak Terduga	10 685	9 756	-8.69
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4 648 751</b>	<b>5 800 476</b>	<b>24.77</b>
1. Belanja Pegawai	334 787	415 819	24.20
2. Belanja Barang dan Jasa	1 640 319	1 957 852	19.36
3. Belanja Modal	2 673 646	3 426 805	28.17
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2 030 737</b>	<b>1 953 551</b>	<b>-3.80</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>10 998 387</b>	<b>12 633 929</b>	<b>14.87</b>

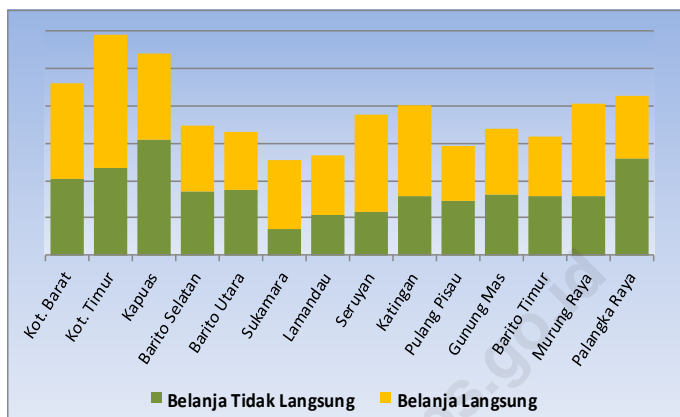


Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2013 mengurangi kontribusi belanja tidak langsung dari 48,16 persen pada tahun 2012 menjadi 45,69 persen. Sementara itu, belanja langsung naik dari 51,84 persen tahun 2012 menjadi 54,31 persen pada tahun 2013.

Belanja modal yang dapat memberikan output lebih bagi pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2013 naik sebesar 28,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja masih cukup besar yaitu 42,36 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kecenderungan mengalokasikan dananya pada belanja bersifat pendanaan aparatur negara.

Belanja modal yang dapat memberikan output lebih bagi pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2013 naik sebesar 28,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja masih cukup besar yaitu 42,36 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kecenderungan mengalokasikan dananya pada belanja bersifat pendanaan aparatur negara.

**Gambar 2.6 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Kalimantan Tengah, 2013**



Dari empat belas kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013, belanja daerah tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, diikuti Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Adapun kabupaten dengan belanja daerah terendah yaitu Kabupaten Sukamara.

Sebagian besar anggaran di Kabupaten Kotawaringin Timur dimanfaatkan untuk belanja langsung yaitu sebesar 60,01 persen. Demikian halnya dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang memanfaatkan 55,71 persen anggarannya untuk belanja langsung. Sementara itu, Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya memanfaatkan sebagian besar anggarannya untuk belanja tidak langsung, yaitu masing-masing sebesar 57,49 persen dan 61,12 persen.



<http://kaleng.bps.go.id>

# Lampiran



**Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 921 944</b>	<b>2 514 031</b>	<b>2 809 096</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	815 244	945 362	1 093 821
1.1. Pajak Daerah	707 444	836 503	973 244
1.2. Retribusi Daerah	6 493	6 963	7 371
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19 942	22 159	25 298
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	81 364	79 736	87 906
2. Dana Perimbangan	1 083 088	1 296 011	1 442 477
2.1. Bagi Hasil Pajak	138 131	163 501	169 674
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	97 225	131 068	146 986
2.3. Dana Alokasi Umum	795 816	951 256	1 062 516
2.4. Dana Alokasi Khusus	51 915	50 184	63 299
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23 611	272 657	272 796
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>132 100</b>	<b>451 605</b>	<b>559 334</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2 054 045</b>	<b>2 965 637</b>	<b>3 368 430</b>

**Lampiran 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>712 053</b>	<b>1 229 065</b>	<b>1 361 950</b>
1. Belanja Pegawai	294 770	321 002	346 955
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	20 580	18 438	13 579
4. Belanja Hibah	21 500	357 148	289 034
5. Belanja Bantuan Sosial	82 097	116 714	59 366
6. Belanja Bagi Hasil	248 637	372 548	485 973
7. Belanja Bantuan Keuangan	42 852	43 083	165 887
8. Belanja Tidak Terduga	1 613	129	1 152
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>812 290</b>	<b>1 122 281</b>	<b>1 566 774</b>
1. Belanja Pegawai	64 050	65 931	67 960
2. Belanja Barang dan Jasa	315 899	420 535	558 211
3. Belanja Modal	432 339	635 814	940 602
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>529 701</b>	<b>614 289</b>	<b>439 704</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2 054 045</b>	<b>2 965 637</b>	<b>3 368 430</b>

**Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah),  
2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8 498 073</b>	<b>9 477 462</b>	<b>11 030 555</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	354 449	487 806	578 255
1.1. Pajak Daerah	96 123	107 145	137 426
1.2. Retribusi Daerah	95 130	123 554	116 097
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 856	39 523	44 844
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	131 339	217 583	279 887
2. Dana Perimbangan	7 176 371	8 128 887	9 190 335
2.1. Bagi Hasil Pajak	518 733	602 236	608 099
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	551 076	658 825	732 710
2.3. Dana Alokasi Umum	5 560 558	6 402 642	7 296 755
2.4. Dana Alokasi Khusus	546 005	465 183	552 769
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	967 253	860 768	1 261 963
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>958 418</b>	<b>1 520 924</b>	<b>1 603 373</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>9 456 491</b>	<b>10 998 387</b>	<b>12 633 928</b>



**Lampiran 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota  
Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah),  
2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3 744 393</b>	<b>4 318 898</b>	<b>4 879 901</b>
1. Belanja Pegawai	3 281 952	3 695 366	4 108 257
2. Belanja Bunga	2 298	3 631	3 590
3. Belanja Subsidi	5 469	4 702	4 135
4. Belanja Hibah	129 422	231 848	374 625
5. Belanja Bantuan Sosial	110 347	64 998	52 534
6. Belanja Bagi Hasil	8 613	9 908	10 493
7. Belanja Bantuan Keuangan	199 840	297 758	316 507
8. Belanja Tidak Terduga	6 452	10 684	9 756
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4 154 373</b>	<b>4 648 751</b>	<b>5 800 476</b>
1. Belanja Pegawai	321 307	334 786	415 818
2. Belanja Barang dan Jasa	1 453 254	1 640 318	1 957 851
3. Belanja Modal	2 379 812	2 673 645	3 426 805
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 557 726</b>	<b>2 030 737</b>	<b>1 953 551</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>9 456 491</b>	<b>10 998 387</b>	<b>12 633 928</b>

**Lampiran 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>645 688</b>	<b>772 238</b>	<b>875 984</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	48 202	66 466	86 595
1.1. Pajak Daerah	9 432	18 226	18 164
1.2. Retribusi Daerah	27 410	33 645	16 256
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 217	4 720	4 352
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	7 143	9 873	47 822
2. Dana Perimbangan	517 762	583 842	654 073
2.1. Bagi Hasil Pajak	43 236	44 315	44 531
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 652	24 645	25 966
2.3. Dana Alokasi Umum	432 772	486 941	566 405
2.4. Dana Alokasi Khusus	27 102	27 939	17 169
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79 724	121 930	135 315
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61 082</b>	<b>116 678</b>	<b>212 688</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>706 770</b>	<b>888 917</b>	<b>1 088 673</b>

**Lampiran 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>292 158</b>	<b>334 957</b>	<b>406 978</b>
1. Belanja Pegawai	257 831	303 461	339 234
2. Belanja Bunga	152	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	7 292	6 876	38 296
5. Belanja Bantuan Sosial	5 415	-	1 592
6. Belanja Bagi Hasil	2 078	1 210	1 925
7. Belanja Bantuan Keuangan	18 877	23 405	25 544
8. Belanja Tidak Terduga	515	2	385
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>271 514</b>	<b>338 812</b>	<b>511 917</b>
1. Belanja Pegawai	23 170	19 254	24 687
2. Belanja Barang dan Jasa	87 371	107 108	129 002
3. Belanja Modal	160 973	212 449	358 227
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>143 097</b>	<b>215 147</b>	<b>169 777</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>706 770</b>	<b>888 917</b>	<b>1 088 673</b>

## Lampiran 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Juta Rupiah), 2011-2013

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>841 969</b>	<b>949 653</b>	<b>1 196 522</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	72 950	105 884	145 905
1.1. Pajak Daerah	27 102	14 392	22 304
1.2. Retribusi Daerah	9 400	8 877	11 231
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 385	3 453	4 092
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	33 062	79 161	108 277
2. Dana Perimbangan	664 506	737 149	876 666
2.1. Bagi Hasil Pajak	51 611	58 327	71 615
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 281	29 974	39 373
2.3. Dana Alokasi Umum	531 969	618 026	708 665
2.4. Dana Alokasi Khusus	45 646	30 820	57 011
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	104 513	106 619	173 951
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>86 951</b>	<b>159 856</b>	<b>254 801</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>928 921</b>	<b>1 109 509</b>	<b>1 451 323</b>

**Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>380 824</b>	<b>415 798</b>	<b>470 535</b>
1. Belanja Pegawai	335 955	373 659	417 576
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	12 800	9 020	11 784
5. Belanja Bantuan Sosial	8 815	6 972	8 875
6. Belanja Bagi Hasil	-	938	938
7. Belanja Bantuan Keuangan	22 596	25 102	30 628
8. Belanja Tidak Terduga	658	105	731
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>381 140</b>	<b>431 807</b>	<b>706 096</b>
1. Belanja Pegawai	35 827	45 870	50 321
2. Belanja Barang dan Jasa	189 023	212 977	289 755
3. Belanja Modal	156 290	172 959	366 019
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>166 957</b>	<b>261 903</b>	<b>274 692</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>928 921</b>	<b>1 109 509</b>	<b>1 451 323</b>

**Lampiran 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kapuas  
(Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>882 441</b>	<b>1 004 325</b>	<b>1 127 994</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	25 548	51 109	45 983
1.1. Pajak Daerah	4 305	6 042	8 941
1.2. Retribusi Daerah	8 594	14 703	10 403
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 202	2 568	3 113
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	10 446	27 795	23 525
2. Dana Perimbangan	722 951	852 536	941 245
2.1. Bagi Hasil Pajak	37 448	48 455	49 400
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44 541	70 617	75 085
2.3. Dana Alokasi Umum	572 637	660 647	744 617
2.4. Dana Alokasi Khusus	68 324	72 816	72 142
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133 943	100 679	140 765
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>72 450</b>	<b>132 168</b>	<b>10 657</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>954 891</b>	<b>1 136 494</b>	<b>1 138 651</b>

**Lampiran 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kapuas (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>476 795</b>	<b>587 277</b>	<b>618 797</b>
1. Belanja Pegawai	437 434	494 091	541 294
2. Belanja Bunga	-	1 268	1 727
3. Belanja Subsidi	106	178	-
4. Belanja Hibah	15 425	37 796	19 076
5. Belanja Bantuan Sosial	5 224	5 444	3 806
6. Belanja Bagi Hasil	533	591	636
7. Belanja Bantuan Keuangan	17 412	44 456	50 246
8. Belanja Tidak Terduga	660	3 450	2 010
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>349 661</b>	<b>371 242</b>	<b>457 396</b>
1. Belanja Pegawai	26 609	24 266	31 824
2. Belanja Barang dan Jasa	111 318	126 462	160 535
3. Belanja Modal	211 734	220 514	265 036
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>128 435</b>	<b>177 974</b>	<b>62 456</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>954 891</b>	<b>1 136 494</b>	<b>1 138 651</b>

**Lampiran 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>562 600</b>	<b>640 720</b>	<b>708 451</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	14 575	25 097	24 893
1.1. Pajak Daerah	2 724	9 980	6 771
1.2. Retribusi Daerah	6 361	7 202	9 490
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 548	3 409	4 055
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	2 942	4 505	4 576
2. Dana Perimbangan	493 160	570 120	614 158
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 429	51 708	46 151
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	67 434	27 573	24 517
2.3. Dana Alokasi Umum	385 592	450 692	504 292
2.4. Dana Alokasi Khusus	31 705	40 146	39 197
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54 865	45 501	69 399
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>54 112</b>	<b>81 029</b>	<b>100 302</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>616 713</b>	<b>721 750</b>	<b>808 753</b>



**Lampiran 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>289 036</b>	<b>285 044</b>	<b>340 395</b>
1. Belanja Pegawai	242 592	245 256	302 373
2. Belanja Bunga	256	315	82
3. Belanja Subsidi	225	700	-
4. Belanja Hibah	25 373	16 194	13 779
5. Belanja Bantuan Sosial	4 835	2 270	3 772
6. Belanja Bagi Hasil	696	1 750	1 551
7. Belanja Bantuan Keuangan	14 887	17 998	18 836
8. Belanja Tidak Terduga	173	559	-
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>233 525</b>	<b>320 872</b>	<b>349 770</b>
1. Belanja Pegawai	16 732	22 152	26 013
2. Belanja Barang dan Jasa	96 612	126 361	143 861
3. Belanja Modal	120 181	172 359	179 895
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>94 151</b>	<b>115 833</b>	<b>118 588</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>616 713</b>	<b>721 750</b>	<b>808 753</b>

**Lampiran 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>592 312</b>	<b>652 334</b>	<b>780 558</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	23 520	28 659	34 345
1.1. Pajak Daerah	2 585	3 185	5 488
1.2. Retribusi Daerah	8 346	13 399	14 918
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 824	3 371	3 601
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	9 765	8 702	10 338
2. Dana Perimbangan	502 907	567 580	656 314
2.1. Bagi Hasil Pajak	50 516	55 834	57 813
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	56 912	68 977	88 313
2.3. Dana Alokasi Umum	359 878	408 492	475 180
2.4. Dana Alokasi Khusus	35 600	34 275	35 007
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65 884	56 094	89 899
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-</b>	<b>138 621</b>	<b>11 781</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>592 312</b>	<b>790 956</b>	<b>792 339</b>

**Lampiran 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>275 838</b>	<b>315 506</b>	<b>350 410</b>
1. Belanja Pegawai	237 770	273 617	293 871
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	5 746	24 233	34 969
5. Belanja Bantuan Sosial	15 785	200	1 137
6. Belanja Bagi Hasil	784	784	784
7. Belanja Bantuan Keuangan	15 255	16 412	19 436
8. Belanja Tidak Terduga	498	258	211
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>257 280</b>	<b>273 449</b>	<b>310 358</b>
1. Belanja Pegawai	19 019	21 611	23 092
2. Belanja Barang dan Jasa	97 865	96 758	108 792
3. Belanja Modal	140 396	155 079	178 472
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>59 193</b>	<b>202 001</b>	<b>131 570</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>592 312</b>	<b>790 956</b>	<b>792 339</b>

**Lampiran 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>387 701</b>	<b>436 964</b>	<b>529 711</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	11 752	14 702	17 760
1.1. Pajak Daerah	1 552	1 820	2 381
1.2. Retribusi Daerah	2 507	3 917	4 975
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 565	3 778	3 808
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	5 127	5 185	6 595
2. Dana Perimbangan	354 892	396 795	471 677
2.1. Bagi Hasil Pajak	31 047	31 037	28 920
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 686	20 046	22 863
2.3. Dana Alokasi Umum	283 203	321 274	381 154
2.4. Dana Alokasi Khusus	26 955	24 436	38 739
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21 056	25 466	40 273
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>52 855</b>	<b>71 029</b>	<b>75 501</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>440 556</b>	<b>507 993</b>	<b>605 212</b>

**Lampiran 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>110 149</b>	<b>130 254</b>	<b>144 833</b>
1. Belanja Pegawai	91 261	102 769	112 489
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	2 852	15 708	19 464
5. Belanja Bantuan Sosial	5 384	775	2 422
6. Belanja Bagi Hasil	2 333	2 316	2 334
7. Belanja Bantuan Keuangan	8 283	8 684	8 122
8. Belanja Tidak Terduga	35	-	-
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>256 817</b>	<b>297 237</b>	<b>368 287</b>
1. Belanja Pegawai	15 141	19 741	23 633
2. Belanja Barang dan Jasa	81 734	92 044	109 389
3. Belanja Modal	159 942	185 451	235 264
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>73 591</b>	<b>80 501</b>	<b>92 092</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>440 556</b>	<b>507 993</b>	<b>605 212</b>

**Lampiran 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten  
 Lamandau (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>461 571</b>	<b>485 050</b>	<b>557 816</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	12 840	14 261	18 443
1.1. Pajak Daerah	1 433	2 031	2 834
1.2. Retribusi Daerah	1 257	3 159	3 831
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 947	2 143	3 034
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	8 202	6 926	8 742
2. Dana Perimbangan	393 604	441 546	492 972
2.1. Bagi Hasil Pajak	35 896	35 440	35 809
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 889	32 615	36 006
2.3. Dana Alokasi Umum	285 963	339 309	383 325
2.4. Dana Alokasi Khusus	43 855	34 181	37 830
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55 127	29 242	46 400
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>54 940</b>	<b>67 057</b>	<b>74 537</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>516 512</b>	<b>552 107</b>	<b>632 354</b>

**Lampiran 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>166 164</b>	<b>189 513</b>	<b>218 074</b>
1. Belanja Pegawai	130 395	144 724	157 474
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	5 585	13 950	30 731
5. Belanja Bantuan Sosial	13 181	5 357	4 258
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	15 690	25 416	25 609
8. Belanja Tidak Terduga	1 313	64	-
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>274 677</b>	<b>285 491</b>	<b>314 870</b>
1. Belanja Pegawai	19 632	25 373	31 246
2. Belanja Barang dan Jasa	70 681	100 394	104 366
3. Belanja Modal	184 364	159 723	179 256
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>75 670</b>	<b>77 103</b>	<b>99 410</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>516 512</b>	<b>552 107</b>	<b>632 354</b>

**Lampiran 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>615 524</b>	<b>677 210</b>	<b>802 159</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	28 144	17 162	20 249
1.1. Pajak Daerah	13 694	1 758	2 887
1.2. Retribusi Daerah	3 073	3 555	3 942
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 768	2 505	3 530
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	9 609	9 342	9 889
2. Dana Perimbangan	548 636	621 017	726 147
2.1. Bagi Hasil Pajak	56 403	55 701	63 978
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	50 663	66 433	78 399
2.3. Dana Alokasi Umum	402 064	450 226	513 570
2.4. Dana Alokasi Khusus	39 506	48 655	70 199
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38 743	39 031	55 761
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>104 580</b>	<b>131 359</b>	<b>163 673</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>720 103</b>	<b>808 569</b>	<b>965 832</b>



**Lampiran 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Seruyan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>188 584</b>	<b>214 518</b>	<b>237 174</b>
1. Belanja Pegawai	148 714	165 553	179 717
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	648	787	1 325
4. Belanja Hibah	13 468	16 793	18 653
5. Belanja Bantuan Sosial	5 623	3 971	2 061
6. Belanja Bagi Hasil	73	176	144
7. Belanja Bantuan Keuangan	19 846	27 038	33 781
8. Belanja Tidak Terduga	212	197	1 491
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>397 518</b>	<b>421 877</b>	<b>516 449</b>
1. Belanja Pegawai	25 765	26 955	28 921
2. Belanja Barang dan Jasa	131 453	118 208	110 529
3. Belanja Modal	240 299	276 714	376 998
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>134 001</b>	<b>172 173</b>	<b>212 208</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>720 103</b>	<b>808 569</b>	<b>965 832</b>

**Lampiran 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Katingan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>629 447</b>	<b>683 946</b>	<b>769 751</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	20 199	30 932	37 222
1.1. Pajak Daerah	2 797	4 871	9 541
1.2. Retribusi Daerah	4 148	6 268	6 925
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 352	2 958	3 242
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	10 902	16 833	17 512
2. Dana Perimbangan	583 077	608 758	665 057
2.1. Bagi Hasil Pajak	36 736	33 912	31 206
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	55 049	54 655	52 588
2.3. Dana Alokasi Umum	467 883	513 410	579 301
2.4. Dana Alokasi Khusus	23 409	6 780	1 960
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26 170	44 255	67 471
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>162 977</b>	<b>242 846</b>	<b>230 928</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>792 424</b>	<b>926 792</b>	<b>1 000 680</b>

**Lampiran 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Katingan (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>256 955</b>	<b>289 374</b>	<b>320 418</b>
1. Belanja Pegawai	219 879	247 727	271 224
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	15 332	16 222	25 428
5. Belanja Bantuan Sosial	2 758	1 336	453
6. Belanja Bagi Hasil	1 320	1 318	1 371
7. Belanja Bantuan Keuangan	16 728	22 449	21 851
8. Belanja Tidak Terduga	938	320	88
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>284 452</b>	<b>402 989</b>	<b>483 104</b>
1. Belanja Pegawai	30 371	23 305	23 721
2. Belanja Barang dan Jasa	78 333	113 185	163 219
3. Belanja Modal	175 748	266 499	296 163
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>251 016</b>	<b>234 428</b>	<b>197 157</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>792 424</b>	<b>926 792</b>	<b>1 000 680</b>

**Lampiran 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>521 692</b>	<b>538 017</b>	<b>636 602</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	13 768	17 475	17 442
1.1. Pajak Daerah	1 110	2 089	1 979
1.2. Retribusi Daerah	4 858	6 285	5 685
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	794	1 253	1 524
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	7 006	7 847	8 252
2. Dana Perimbangan	429 389	488 251	548 812
2.1. Bagi Hasil Pajak	23 708	25 681	29 248
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 451	21 460	23 179
2.3. Dana Alokasi Umum	339 139	397 466	453 776
2.4. Dana Alokasi Khusus	52 091	43 643	42 607
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78 535	32 290	70 347
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61 800</b>	<b>58 564</b>	<b>57 973</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>583 493</b>	<b>596 581</b>	<b>694 575</b>

**Lampiran 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>212 730</b>	<b>244 859</b>	<b>289 721</b>
1. Belanja Pegawai	192 610	216 784	250 569
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	2 552	8 321	14 632
5. Belanja Bantuan Sosial	3 861	3 506	3 768
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	13 643	14 511	20 152
8. Belanja Tidak Terduga	64	1 735	598
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>275 641</b>	<b>285 854</b>	<b>297 239</b>
1. Belanja Pegawai	10 569	11 895	17 850
2. Belanja Barang dan Jasa	69 657	87 235	92 924
3. Belanja Modal	195 415	186 724	186 464
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>95 122</b>	<b>65 866</b>	<b>107 613</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>583 493</b>	<b>596 581</b>	<b>694 575</b>

**Lampiran 25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten  
Gunung Mas (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>533 057</b>	<b>571 479</b>	<b>667 573</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	15 774	22 689	24 660
1.1. Pajak Daerah	2 232	2 794	6 894
1.2. Retribusi Daerah	3 895	4 559	7 269
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 523	3 060	3 716
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	7 124	12 275	6 779
2. Dana Perimbangan	452 449	517 825	599 203
2.1. Bagi Hasil Pajak	27 825	30 316	26 837
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25 934	35 911	38 084
2.3. Dana Alokasi Umum	360 027	414 880	476 671
2.4. Dana Alokasi Khusus	38 662	36 717	57 610
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64 834	30 963	43 708
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>64 098</b>	<b>48 961</b>	<b>42 270</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>597 156</b>	<b>620 441</b>	<b>709 843</b>

**Lampiran 26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten  
Gunung Mas (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>239 035</b>	<b>287 411</b>	<b>327 422</b>
1. Belanja Pegawai	213 897	245 719	267 277
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	6 389	29 311	56 190
5. Belanja Bantuan Sosial	8 250	371	540
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	10 367	10 687	3 300
8. Belanja Tidak Terduga	132	1 321	113
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>305 869</b>	<b>285 803</b>	<b>346 747</b>
1. Belanja Pegawai	7 879	9 243	26 262
2. Belanja Barang dan Jasa	94 393	101 253	111 173
3. Belanja Modal	203 598	175 306	209 312
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>52 251</b>	<b>47 226</b>	<b>35 673</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>597 156</b>	<b>620 441</b>	<b>709 843</b>

**Lampiran 27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>519 262</b>	<b>559 328</b>	<b>634 427</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	12 854	16 967	15 688
1.1. Pajak Daerah	3 174	3 306	3 291
1.2. Retribusi Daerah	3 257	3 368	4 010
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 213	2 758	3 026
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	4 210	7 533	5 360
2. Dana Perimbangan	436 693	488 298	546 566
2.1. Bagi Hasil Pajak	40 584	41 637	39 877
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 760	41 415	42 842
2.3. Dana Alokasi Umum	310 538	373 203	424 326
2.4. Dana Alokasi Khusus	58 811	32 042	39 519
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69 714	54 062	72 171
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32 002</b>	<b>51 782</b>	<b>76 528</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>551 264</b>	<b>611 110</b>	<b>710 955</b>



**Lampiran 28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>231 832</b>	<b>277 856</b>	<b>320 571</b>
1. Belanja Pegawai	206 231	227 317	257 522
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	650	450	450
4. Belanja Hibah	1 043	5 049	25 396
5. Belanja Bantuan Sosial	13 734	17 628	6 517
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	9 910	24 984	26 723
8. Belanja Tidak Terduga	264	2 426	3 961
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>263 981</b>	<b>251 035</b>	<b>317 101</b>
1. Belanja Pegawai	24 395	25 331	34 078
2. Belanja Barang dan Jasa	135 201	120 106	147 311
3. Belanja Modal	104 384	105 597	135 711
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55 452</b>	<b>82 219</b>	<b>73 283</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>551 264</b>	<b>611 110</b>	<b>710 955</b>

**Lampiran 29. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>662 328</b>	<b>786 357</b>	<b>868 135</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	19 348	25 881	25 507
1.1. Pajak Daerah	794	1 897	2 324
1.2. Retribusi Daerah	3 514	4 723	6 325
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 913	2 737	2 784
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	13 126	16 522	14 071
2. Dana Perimbangan	609 972	702 735	758 909
2.1. Bagi Hasil Pajak	48 706	48 297	48 702
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	104 169	144 725	164 274
2.3. Dana Alokasi Umum	442 498	508 288	545 932
2.4. Dana Alokasi Khusus	14 599	1 423	-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33 007	57 741	83 718
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>133 240</b>	<b>169 890</b>	<b>225 552</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>795 568</b>	<b>956 248</b>	<b>1 093 687</b>

**Lampiran 30. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>235 136</b>	<b>285 659</b>	<b>315 066</b>
1. Belanja Pegawai	201 315	226 853	243 631
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	3 840	2 586	2 360
4. Belanja Hibah	3 725	10 584	27 298
5. Belanja Bantuan Sosial	8 851	9 573	9 716
6. Belanja Bagi Hasil	795	821	807
7. Belanja Bantuan Keuangan	15 621	35 145	31 087
8. Belanja Tidak Terduga	989	93	164
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>386 778</b>	<b>442 037</b>	<b>490 730</b>
1. Belanja Pegawai	47 608	35 520	42 111
2. Belanja Barang dan Jasa	118 172	132 594	161 970
3. Belanja Modal	220 997	273 923	286 647
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>173 654</b>	<b>228 552</b>	<b>287 891</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>795 568</b>	<b>956 248</b>	<b>1 093 687</b>

**Lampiran 31. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Palangka Raya (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>642 480</b>	<b>719 835</b>	<b>874 865</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	34 974	50 515	63 556
1.1. Pajak Daerah	23 189	34 747	43 622
1.2. Retribusi Daerah	8 508	9 885	10 831
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	604	804	959
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	2 673	5 077	8 142
2. Dana Perimbangan	466 372	552 429	638 529
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 587	41 569	34 006
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 652	19 771	21 213
2.3. Dana Alokasi Umum	386 393	459 782	539 535
2.4. Dana Alokasi Khusus	39 739	31 305	43 773
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	141 135	116 890	172 779
<b>B. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>17 328</b>	<b>51 077</b>	<b>66 179</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>659 809</b>	<b>770 913</b>	<b>941 044</b>

**Lampiran 32. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Palangka Raya (Juta Rupiah), 2011-2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>389 155</b>	<b>460 867</b>	<b>519 501</b>
1. Belanja Pegawai	366 068	427 831	474 001
2. Belanja Bunga	1 890	2 048	1 781
3. Belanja Subsidi	-	-	-
4. Belanja Hibah	11 840	21 783	38 922
5. Belanja Bantuan Sosial	8 632	7 589	3 611
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	725	1 464	1 184
8. Belanja Tidak Terduga	-	150	-
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>215 520</b>	<b>240 239</b>	<b>330 406</b>
1. Belanja Pegawai	18 588	24 265	32 053
2. Belanja Barang dan Jasa	91 439	105 629	125 018
3. Belanja Modal	105 492	110 344	173 334
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55 134</b>	<b>69 805</b>	<b>91 135</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>659 809</b>	<b>770 913</b>	<b>941 044</b>

## DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2013; Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2011-2012.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015; Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 2014.

<http://kalteng.antaranews.com/berita/242141/masyarakat-kotawaringin-timur-makin-sadar-bayar-pajak>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/12/30/mymkdr-realisasi-pendapatan-kotawaringin-timur-lampau-target>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112  
Telp (0536) 3228105, Faks (0536) 3221380, Email : [bps6200@bps.go.id](mailto:bps6200@bps.go.id)  
Homepage : <http://kalteng.bps.go.id>

